



Kepemimpinan Kepala Negara Perempuan: Studi Komparatif antara Indonesia dan Selandia Baru

Zikra Putri Irmalinda¹, Lince Magriasti^{2*}

¹Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*penulis korespondensi: lince@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 October 2022

Received in revised form 22 September 2022

Accepted 15 Desember 2022

ABSTRACT

Penelitian mengenai representasi perempuan dalam politik telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berapa analisis mengenai kepemimpinan berfokus pada preferensi dan kinerja perempuan sebagai legislator, dan kendala serta peluang yang mereka hadapi dalam kepemimpinannya. Negara Indonesia dan Selandia Baru pernah dikepalai oleh seorang perempuan. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan kepemimpinan perempuan kepala negara Indonesia, Presiden Megawati Soekarnoputri, dengan kepala negara Selandia Baru, Perdana Menteri Jacinda Ardern. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kepemimpinan Presiden Megawati sebagai kepala negara di Indonesia merupakan kepemimpinan perempuan yang pertama kalinya, sedangkan Perdana Menteri Jacinda Adern di Selandia Baru bukanlah pemimpin perempuan pertama di negara itu. Perdana Menteri Jacinda Adern terpilih menjadi Perdana Menteri pada pencalonannya yang pertama, yang diusung oleh Partai Buruh. Lain halnya dengan Presiden Megawati yang diputuskan melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden Megawati memiliki kekuatan pada prestise dan statusnya sebagai anak Presiden Pertama Indonesia, berbeda dengan Perdana Menteri Jacinda Ardern yang diusung oleh partai buruh tanpa memiliki prestise keluarga, melainkan memiliki kepemimpinan otentik melalui keterampilan komunikasi publik yang luar biasa yang ia miliki.

Keyword:

Kepemimpinan, Komparatif, Indonesia, Selandia Baru

PENDAHULUAN

Terdapatnya pemimpin perempuan di berbagai bidang, baik legislatif maupun eksekutif, menunjukkan adanya kesamaan gender (gender equality). Pemimpin perempuan yang ada di organisasi pemerintah merupakan bukti bahwa penerimaan seorang pemimpin oleh

masyarakat sebagian besar ditentukan oleh kualifikasinya, bukan jenis kelamin (Islam and Nasira, 2016). Sikap positif seorang pemimpin lebih berkorelasi dengan tingkat dan jenis pendidikan, serta refleksi pengalaman masa lalu. Keunggulan teknologi, pendidikan tinggi,

¹lince@gmail.com

dan dukungan yang baik dari keluarga, dapat membuktikan bahwa pemimpin perempuan tidak kalah dari kepemimpinan laki-laki (Pranathi and Lathabhavan, 2021; Hejaase et.al., 2013).

Perempuan masuk parlemen kini telah menjadi normal dan lebih diterima. Pencapaian ini membuktikan bahwa masyarakat sudah tidak ragu lagi untuk mempercayakan kepemimpinan di daerahnya kepada perempuan. Namun demikian, upaya perempuan dalam meraih kepemimpinan dan jabatan publik bukanlah hal yang mudah. Menurut Karim (2007) dan Hastuti (2015) partisipasi perempuan dalam dunia publik memiliki tantangan kultural dan structural, yang menyangkut sistem ideologi dan pengaruhnya dalam pembentukan cara pandang.

Sejarah sebetulnya telah mencatat kemunculan beberapa kepemimpinan kaum perempuan. Hart (1994) menyebutkan beberapa pemimpin perempuan di dunia, antara lain Ratu Bilqis yang memimpin kerajaan Saba, Tribhuwana Wijayatunggadewi sebagai penguasa ketiga Kerajaan Majapahit pada tahun 1328-1351, serta kepemimpinan Ratu Elizabeth di Inggris. Di Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, seorang kepala negara perempuan pun pernah memimpin, yaitu Presiden Megawati Sukarnoputri. Ia merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri

Presiden perempuan pertama di Indonesia, dengan nama lengkap Diah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, memimpin Indonesia pada tahun 2001 hingga tahun 2004. Statusnya sebagai anak kedua Presiden Soekarno (Hapsari, 2017), founding father sekaligus presiden pertama Indonesia, memberinya

Meskipun di Indonesia kepemimpinan perempuan masih selalu menjadi suatu pro dan kontra, Presiden Megawati telah mengepalai negara Indonesia selama periode 2001-2004.

Saat ini, salah satu negara yang sedang dipimpin oleh perempuan adalah Selandia Baru. Selandia Baru dipimpin oleh seorang Perdana Menteri perempuan yang tergolong masih sangat muda, yaitu Perdana Menteri Jacinda Ardern. Perdana Menteri Jacinda Ardern yang terpilih menjadi Perdana Menteri pada usia 37 tahun, merupakan Perdana Menteri termuda selama terbentuknya negara Selandia Baru. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kepemimpinan perempuan kedua negara tersebut, Indonesia dan Selandia Baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada November 2022 dengan melakukan studi literatur. Data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian direduksi dan diverifikasi dengan teknik triangulasi sumber. Uji triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari sumber yang berbeda. Kemudian data disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi.

prestise “bukan orang biasa” (Soekarnoputri, 2021). Ia dibesarkan dalam suasana keistanaan karena ayahnya menjabat sebagai presiden. Sehingga dalam kepemimpinannya, status dan prestise menjadi keunggulan Presiden Megawati. Menurut Klapp (1964) dalam Safitri (2014), pemimpin simbolik yakni seseorang yang mencoba mengkomunikasikan bagaimana status, prestise, dan reputasinya.

Tidak hanya status dan prestise yang menjadikan Presiden Megawati memiliki keunggulan dalam kepemimpinannya, melainkan juga reputasi yang ia peroleh sendiri. Megawati telah membangun reputasinya dengan berkecimpung dalam Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia (GNMI) saat menjadi mahasiswa di Universitas Padjajaran dan Universitas Indonesia (Soekarnoputri, 2021). Setelah menyelesaikan studinya, Megawati mulai aktif terlibat di dunia politik dan bergabung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), di mana salah satu tokoh besar partai tersebut ialah ayahnya.

Seiring karir politik Megawati yang terus melaju, ia pun terpilih menjadi wakil ketua Partai PDI-Perjuangan Cabang Jakarta Pusat. Kemudian ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Megawati tidak serta merta menjadi Presiden. Mulanya, Sidang Umum MPR tahun 1999, memutuskan Gus Dur sebagai presiden dan Megawati sebagai wakilnya. Dua tahun kemudian, 23 Juli 2001, mandat MPR RI memutuskan status Gus Dur sebagai presiden dicabut. Kemudian, barulah Megawati diangkat menjadi Presiden.

Kesempatan Megawati memimpin Indonesia hanya pada tahun 2001-2004, atas penunjukannya oleh MPR. Selama kepemimpinan tersebut, Presiden Megawati menghadapi krisis multidimensional. Sebagian besar krisis tersebut merupakan bagian dan kelanjutan dari krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan, dan krisis keamanan nasional (Soekarnoputri, 2021). Selain krisis ekonomi, pada kurun waktu tahun 2001 dan 2004, Indonesia juga mengalami beberapa ancaman nasional, seperti konflik etnis dan agama serta ancaman separatisme dan terorisme. Menurut Wirutomo (2003) dalam Soekarnoputri (2021), konflik etnis yang

terjadi di Indonesia saat itu disebabkan oleh dua hal, yakni terjadinya perubahan konstelasi politik pada masa reformasi, dan iklim kebebasan yang dijadikan rakyat sebagai kesempatan untuk mengungkapkan keresahan.

Berbagai krisis di Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Megawati diselesaikan melalui berbagai pendekatan. Krisis ekonomi Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Megawati diselesaikan melalui berbagai upaya perundingan, diplomasi, dan kebijakan pembangunan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. Politik luar negeri Indonesia pada masa itu dijalankan sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945. Krisis social yang berupa konflik masyarakat etnik dan agama diselesaikan melalui berbagai perundingan damai dan kesepakatan bersama.

Konflik lingkungan pun terjadi pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Hal ini tersebut diatasnya dengan pengesahan kebijakan pemerintah dan membentuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN). Sedangkan krisis bidang pertahanan dan keamanan diselesaikan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Bela Negara dan Kesejahteraan Prajurit TNI/Polri.

Masa pemerintahan Megawati berakhir pada tahun 2004 ketika pemilihan umum oleh rakyat kembali dilangsungkan. Pada 20 September 2004, Megawati kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu. Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahan Megawati, terpilih menjadi Presiden. Lima tahun kemudian, pada tahun 2009, Megawati kembali maju sebagai calon presiden, dan gagal lagi.

Selanjutnya, pada pemilu tahun 2014, Megawati banyak membentuk pendapat nasional, mulai dari pemberi mandat yang dilakukan sebelum

pemilihan legislatif (pileg), hingga terdengar konflik dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, terkait pemberian mandat tersebut. Megawati, dinilai sebagai sosok yang berkhianat terhadap perjanjian yang pernah dibuat dengan Prabowo, terkait pilpres 2014 (safitri, 2014). Status Megawati yang pernah menjadi Presiden, tidak menjanjikan keterpilihannya kembali oleh masyarakat. Meski telah beberapa kali menjadi calon Presiden, tetap saja tidak berhasil. Fakta ini, menunjukkan keraguan dan pertanyaan publik atas kepemimpinannya.

Kepemimpinan Perdana Menteri Jacinda Ardern

Di Selandia Baru, Perdana Menteri Jacinda Ardern yang kini sedang memimpin pemerintahan, bukanlah pemimpin perempuan pertama di negara itu. Sebelumnya, Perdana Menteri perempuan yang lain, Helen Clark, telah pernah memimpin Selandia Baru pada tahun 1993 (McLean, 2018; Curtin, 2008). Namun demikian, Perdana Menteri Ardern memang Perdana Menteri termuda dalam sejarah negara Selandia Baru.

Jacinda Ardern memenangkan suara rakyat pada pemilihan umum tahun 2017. Ia merupakan calon Perdana Menteri yang diusung oleh partai buruh. Kepemimpinannya telah menjadi sosok lambang karakter kepemimpinan politik kontemporer. Keterampilan kepemimpinan dan politiknya diwujudkan dalam komunikasinya yang sangat baik, sesuai dengan keahliannya yang pernah menempuh pendidikan tinggi di bidang komunikasi politik.

Keterampilan komunikasi Jacinda Ardern berhasil membuatnya berinteraksi dengan efektif dalam berbagai konteks sosial. Sehingga terbentuklah opini serta tanggapan publik yang baik. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penentu

kemenangannya pada pemilihan umum tahun 2017 di Selandia Baru.

Kepemimpinan erat kaitannya dengan konteks manajemen krisis. Baru-baru ini pemimpin perempuan termuda di Selandia Baru itu berhasil membawa negaranya menjadi negara pertama keluar dari krisis Covid-19 (Craig, 2021). Sebagai tanggapan atas ancaman Covid-19, pemerintah mengumumkan empat tingkat sistem peringatan Covid-19. Seiring dengan pengumuman keadaan darurat, negaranya paling pertama siap untuk melaksanakan penguncian (*lock down*). Keputusan-keputusan tegas dan cepat yang diambil Perdana Menteri Ardern menyelamatkan Selandia Baru dari krisis Covid-19. Saat itu, Ardern sangat jelas mengartikulasikan pesannya yang sederhana agar masyarakat tidak keluar rumah, melalui pidatonya ia menyampaikan:

"Anda tidak sendiri... Keberhasilan tidak instan. Anda mungkin tidak pergi bekerja, tapi itu bukan berarti Anda tidak memiliki pekerjaan. Tugas Anda adalah menyelamatkan nyawa. Jika Anda memiliki pertanyaan dan Anda sedang mencari jawaban, terapkan aturan yang sederhana ini—bertindaklah seolah-olah Anda mengidap Covid-19. Jadilah baik, tinggal di rumah, istirahat, putus mata rantai (infeksi Covid-19)." (Craig, 2021)

Keberhasilan respons nasional Selandia Baru terhadap virus Covid-19 tidak bisa dibilang kecil pengaruhnya dari gaya kepemimpinan politik Perdana Menteri Jacinda Ardern. Selama penguncian di negara itu, konferensi media selalu melibatkan presentasi oleh Perdana Menteri Ardern sendiri, atau terkadang bersama menteri terkait. Ardern tidak takut dengan keputusannya untuk melakukan penguncian selama 30 hari, sebab ia memiliki rencana yang jelas (Craig, 2021). Tindakan dan wacana Ardern melalui krisis Covid-19 semakin mengukuhkan reputasinya sebagai

seorang politisi yang efektif dan terampil. Reputasi yang muncul dari caranya berkomunikasi dalam menanggapi krisis nasional.

Selain krisis Covid-19, keterampilan kepemimpinan Jacinda Ardern juga tampak melalui penanganan serangan terror masjid Christchurch pada 2019, dan Letusan gunung berapi di Pulau Putih. Ardern berhasil kembali membangun kepercayaan publik dalam menghadapi krisis. Dalam kasus terror di masjid Christchurch, Ardern membuat beberapa keputusan yang efektif dan tetap waspada (Balci, 2021). Berhati-hati berarti mengambil tindakan pencegahan untuk masa depan. Untuk tujuan ini, Ardern tampaknya telah membuat beberapa keputusan yang efektif dalam menghilangkan trauma mendalam dan gangguan stres pasca trauma yang dialami oleh umat Islam dan masyarakat lokal di

SIMPULAN

Kepemimpinan Presiden Megawati sebagai sebagai kepala negara perempuan di Indonesia merupakan yang pertama kalinya, sedangkan Perdana Menteri Jacinda Adern di Selandia Baru bukanlah pemimpin perempuan pertama di negara itu. Perdana Menteri Jacinda Adern terpilih menjadi Perdana Menteri pada pencalonannya yang pertama, yang diusung oleh Partai Buruh. Lain halnya dengan Presiden Megawati yang diputuskan melalui Sidang MPR, dan kemudian selalu gagal dalam pemilihan umum pada beberapa pencalonannya. Presiden Megawati memiliki kekuatan pada prestise dan statusnya sebagai anak Presiden Pertama Indonesia, berbeda dengan Perdana Menteri Jacinda Ardern yang memiliki kepemimpinan otentik melalui keterampilan komunikasi publik yang luar biasa yang ia miliki.

DAFTAR PUSTAKA

Balci, O. 2021. Authentic leadership: A

negaranya (Kerdelmelidis dan Reid, 2019). Perdana menteri mengambil langkah signifikan pertamanya dengan meningkatkan tingkat keamanan, untuk menghilangkan rasa takut akan kekerasan akibat kejadian tersebut.

Tidak diragukan lagi bahwa Penembakan Masjid Christchurch memberikan tanggung jawab yang besar kepada Ardern, yang dinilai masih muda dan belum memiliki cukup pengalaman dan kesempatan untuk mengevaluasi diri. Namun, ia berhasil memenuhi tanggung jawabnya dengan gaya kepemimpinan yang otentik. Wacana kepemimpinan yang diadopsi Adern dalam periode kritis cocok dengan gaya asli kepemimpinan, sehingga disebut gaya kepemimpinannya sangat otentik. Gaya kepemimpinannya yang otentik paling nyata melalui komunikasi dan presentasinya di hadapan publik yang selalu singkat dan jelas.

thematic analysis of Jacinda Ardern's speeches during Christchurch mosque shootings. *Turkish Studies*, 16(1), 83-103.

Craig, Geoffrey. 2021. Kindness and Control: The Political Leadership of Jacinda Ardern in the Aotearoa New Zealand COVID-19 Media Conferences. *Journalism and Media* 2: 288-304

Curtin, J. 2008. Women, Political Leadership and Substantive Representation: the Case of New Zealand. *Parliamentary Affairs* Vol. 61 No. 3, 490-504

Hastuti, D K. 2015. Profile, statuses, and performance of female local leaders: Impact study of Direct Local Elections. *Indonesian feminist journal*. Vol 3 no. 1 pp 47-52.

Hapsari, N. 2017. Framing Women Politician in Democratic Environment: A Study of Megawati Soekarno Putri and Hillary Clinton. *Rubikon Journal*, (4) 1.

Hart, M H. 1994. Seratus Tokoh yang

- Paling Berpengaruh dalam Sejarah. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.
- Hejase, H., Haddad Z, Hamdar B, Rasha M., 2013. Female Leadership: An Exploratory Research from Lebanon. *American Journal of Scientific Research*: (86) 28-52.
- Islam M, and Nasira S. 2016. Attitude Towards Women Leadership in Organizations: *OSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*: 18 (1) 112-139
- Dahuri, R. dan K. Samah. 2019. *The Brave Lady: Megawati dalam Catatan Kabinet Gotong Royong*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karim. 2007. Kepemimpinan perempuan Pemimpin Wanita Madura. *Jurnal Mimbar*. 23 (2): pp221-234.
- Kerdelmelidis M, and Reid, MC. 2019. Wellbeing recovery after mass shootings: Information for the response to the Christchurch Mosque Attacks 2019. *Rapid Literature Review*. Christchurch, New Zealand: Planning and Funding.
- Klapp, O E. 1964. *Symbolic Leaders: Public Dramas and Public Men*. USA: Irvington Publisher
- cit. Safitri, Dini. 2014. Woman and Political Communication: Megawati dan Pemimpin Simbolik. *Jurnal komunikasi*: 9 (1), 49-58.
- McLean, G. 2018. *New Zealand History: Biography of Helen Clark*. Tersedia online: URL: Helen Clark | NZHistory, New Zealand history online, diakses pada 18 November 2022.
- Safitri, D. 2014. Woman and Political Communication: Megawati dan Pemimpin Simbolik. *Jurnal komunikasi*: 9 (1), 49-58.
- Soekarnoputri, D P M S. 2021. Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi 2001-2004. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* :11 (1), 49-66
- Pranathi, B K P, and Lathabhavan R. 2021. A Study on Role of Woman in Leadership Positions. *International Journal of Innovative Research in Applied Sciences and Engineering*: 4 (12).